



Transformasi Kinerja Administrasi Publik di badan Pusat Statistik Indonesia

Tenti Kurnia^{1)*}, Yushita Marini²⁾, Nilman Ghofur³⁾

Universitas Terbuka, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Indonesia¹⁾

Universitas Terbuka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Indonesia²⁾

UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, Indonesia³⁾

tenti.kurnia@bps.go.id¹⁾, yushita@ecampus.ut.ac.id²⁾, nilman.ghofur@uin-suka.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi kinerja administrasi publik di Badan Pusat Statistik (BPS) melalui integrasi modernisasi tata kelola data, adopsi teknologi digital, dan reformasi birokrasi. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia statistik resmi memiliki peran krusial dalam mendukung kebijakan berbasis bukti. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan deret waktu yang menelusuri perubahan kebijakan dan kinerja organisasi BPS secara kronologis dalam periode 2014-2025, dengan titik fokus utama sejak implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada tahun 2019. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, dan laporan kielembagaan BPS. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik dan komparatif antar periode untuk mengidentifikasi pola transformasi kinerja administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi yang dilakukan BPS berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja administrasi publik, terutama dalam aspek efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan kualitas layanan data statistik. Perubahan transformasi tersebut terlihat dari percepatan hasil produksi data, peningkatan akurasi data, serta penguatan peran BPS sebagai wali data nasional. Namun demikian, transformasi masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan kapasitas digital, integrasi data lintas instansi, serta isu keamanan informasi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan model kinerja administrasi publik berbasis data digital serta memperkuat pendekatan longitudinal dalam studi transformasi kelembagaan sector publik.

Kata kunci: Kinerja Administrasi Publik; BPS; Transformasi Digital; Tata Kelola Data; Reformasi Birokrasi.

Abstract

This research analyzes the transformation of publik administration performance at the Central Statistiks Agency (BPS) through the integration of data governance modernization, digital technology adoption, and bureaucratic reform. This research employs a descriptive qualitative approach with a time-series policy analysis method that traces changes in BPS's policies and organizational performance chronologically over the period 2014-2025, primarily on the implementation of the One Data Indonesia policy in 2019. Data were obtained through literature studies, policy document analysis, and BPS institutional reports. The analysis employed a thematic and comparative approach across periods to identify patterns of transformation in publik administration performance. The results that the transformation undertaken by BPS has had a significant impact on improving publik administration performance, particularly in terms of efficiency, effectiveness, responsiveness, and the quality of statistikal data services. This transformation is evident in the acceleration of data production, increased data accuracy, and the strengthening of BPS's role as the national data guardian. However, the transformation still faces challenges such as digital capacity gaps, cross-agency data integration, and information security issues. This research provides theoretical contributions in the digital data-based publik administration performance model and strengthens the longitudinal approach in the study of publik sector institutional transformation.

Keywords: *Publik Administration Performance; Central Statistiks Agency; Digital Transformation; Data Governance; Bureaucratic Reform.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan pemerintah, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dengan tujuan untuk memanfaatkan transformasi administrasi publik menjadi agenda strategis dalam perubahan tata kelola pemerintah di era digital, mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari yang bersifat *administrative convensional* menuju sistem yang lebih adaptif, terintegrasi dan berbasis data (*data-given governance*). Sehingga, kinerja administrasi publik tidak lagi sekedar diukur berdasarkan efisiensi prosedural, namun juga dari kemampuan institusi dalam menyediakan informasi akurat, tepat waktu dan relevan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-base policy*) (Vial, 2019; Mergel et al., 2019).

BPS sebagai lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab terhadap penyediaan data statistik resmi nasional memiliki peran strategis dalam mendukung sistem administrasi publik berbasis data. Data statistik yang dihasilkan BPS tidak hanya digunakan untuk perencanaan pembangunan, namun juga menjadi dasar dalam evaluasi kebijakan, pengambilan keputusan, serta pengukuran capaian pembangunan nasional di Indonesia. Data statistik menjadi instrumen utama dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan (Osborne, 2018; Van Dooren et al., 2015). Karena itu, kebutuhan atas kualitas kinerja administrasi publik di BPS akan menentukan efektivitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Pada praktiknya, BPS seringkali menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional, antara lain keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia, kendala koordinasi lintas instansi, serta isu keamanan dan integrasi data dalam proses transformasi digital (Siregar, 2023; Mochtar & Shishadayati, 2024; Amelia & Rahayu, 2023). Model produksi statistik konvensional yang mengandalkan sensus dan survey memiliki keterbatasan dan dari sisi kecepatan, biaya serta frekuensi penyediaan data. Selain itu, tata kelola data di Indonesia sebelumnya memiliki kecenderungan terfragmentasi antar kementerian dan lembaga, sehingga menyebabkan inkonsistensi data, duplikasi informasi, dan rendahnya interoperabilitas sistem. Hal ini berdampak pada belum optimalnya kinerja administrasi publik, khususnya aspek efektivitas, responsivitas dan akuntabilitas.

Transformasi kinerja bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga mencakup perubahan dalam struktur organisasi, budaya kerja, pola koordinasi antar instansi dan proses bisnis yang sedang terjadi. Digitalisasi statistik melalui pemanfaatan survei online, data administratif dan *bigdata* dapat mempercepat proses produksi data. Pada sisi lainnya, reformasi birokrasi mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Integrasi ketiga aspek tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja administrasi publik di BPS.

Meskipun demikian, kajian empiris yang mengkaji transformasi kinerja administrasi publik di lembaga statistik nasional masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung membahas tentang transformasi digital pemerintah secara umum atau membahas tentang implementasi kebijakan Satu Data Indonesia secara parsial. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan dimensi tata kelola data, digitalisasi dan reformasi birokrasi dalam satu kerangka analisis sebagai penjelasan perubahan kinerja administrasi publik jangka panjang.

Karenanya, penelitian ini berusaha memenuhi kesenjangan tersebut dengan mengkaji transformasi kinerja administrasi publik di Badan Pusat Statistik Indonesia secara komprehensif dan berbasis waktu (*time-series analysis*), khususnya sejak implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada tahun 2019 hingga periode terkini. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika perubahan kinerja administrasi publik dalam konteks transformasi kelembagaan berbasis digital.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana transformasi kinerja administrasi publik di Badan Pusat Statistik Indonesia, Bagaimana peran modernisasi tata kelola data, adopsi teknologi digital, dan reformasi birokrasi dalam peningkatan kinerja tersebut, Bagaimana dinamika perubahan kinerja administrasi publik BPS dalam perspektif *time-series* sejak implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Harapannya, penelitian ini dapat

memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep kinerja administrasi publik berbasis digital, juga dapat memberikan kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan penguatan tata kelola data nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual. Dengan desain *time-series policy analysis* untuk menganalisis perubahan kebijakan dan kinerja organisasi secara longituninal berdasarkan periode waktu tertentu (Dunn, 2018). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan kondisi statis, tetapi juga menelusuri perkembangan transformasi secara kronologis dari sebelum hingga setelah intervensi kebijakan utama, yaitu Implementasi Satu Data Indonesia.

Penelitian ini mengembangkan formula metodologi berbasis integrasi kebijakan kualitatif dan analisis kebijakan longitudinal sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Kualitatif, mengacu pada Creswell (2014), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dan organisasional berdasarkan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap terhadap transformasi kinerja administrasi publik di BPS.
- 2) *Time-Series Policy Analysis*, pendekatan ini merujuk pada analisis kebijakan yang menelusuri perubahan dalam rentang waktu tertentu untuk mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap organisasi (Dunn, 2018). Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada periode 2014-2025 dengan titik kritis pada tahun 2019 sebagai kebijakan Satu Data Indonesia.
- 3) Analisis Tematik, mengacu Braun & Clarke (2006) untuk mengkategorikan data ke dalam tema utama, yaitu: Tata Kelola Data, Digitalisasi, Reformasi Birokrasi, Kinerja Administrasi Publik.
- 4) Analisis Komparatif Antar Periode, merupakan pendekatan komparatif untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi kebijakan utama, sehingga dapat mengidentifikasi perubahan pola kinerja administrasi publik.



Gambar 1. Skema Metodologi
Sumber: Hasil Penelitian

Sumber data dan teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui:

- 1) Dokumen kebijakan: Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 (Satu Data Indonesia), Kebijakan SPBE, Regulasi terkait Statistik Nasional.
- 2) Publikasi resmi BPS: Laporan Tahunan, Publikasi Statistik, Dokumen Transformasi Digital.
- 3) Literatur Ilmiah: Jurnal Nasional dan Internasional, Buku Administrasi Publik dan Kebijakan

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, studi dokumentasi dan penelusuran referensi ilmiah. Dengan pendekatan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai dinamika transformasi kinerja administrasi publik di Badan Pusat Statistik Indonesia, tidak hanya dari sisi deskriptif, tetapi juga dari perspektif temporal dan kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Kinerja dalam Administrasi Publik

Kinerja (*performance*) merupakan suatu konsep sentral dalam administrasi publik yang dapat digunakan dalam menilai tingkat keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai individu atau organisasi dalam periode tertentu berdasarkan standar yang telah ditentukan. Moehariono (2012) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran organisasi. Dalam konteks organisasi publik, kinerja memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan sektor privat, karena melibatkan kepentingan publik, nilai-nilai sosial, dan aspek politik.

Rosenbloom (2008) menyampaikan bahwa administrasi publik dapat dipahami melalui tiga perspektif utama, yaitu perspektif manajerial (efisiensi dan efektivitas), perspektif politik (respon terhadap kepentingan publik), dan perspektif hukum (kepatuhan terhadap aturan). Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa administrasi publik telah bertransformasi menuju *digital governance*, dimana sistem pemerintahan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi, data, dan jaringan antar aktor (Dunleavy et al., 2006). Dalam konteks ini, peran administrasi publik tidak lagi sebatas pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai pengelola data (*data governance*) dan fasilitator kolaborasi antar sektor pemerintahan.

Kinerja administrasi publik mencerminkan tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Dwiyanto, 2006). Indikator kinerja meliputi efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan akuntabilitas (Van Dooren et al., 2015). Dalam perkembangannya, konsep kinerja mengalami evolusi: pendekatan klasik menjadi efisiensi prosedural, *New Public Management* dengan orientasi hasil, dan *New Public Service* dalam pelayanan publik dan nilai demokrasi (Denhardt & Denhardt, 2015). Di era digital, kinerja berkembang menjadi *data-driven performance*, dimana penggunaan data menjadi dasar pengambilan keputusan (Osborne, 2018).

2. Teori Transformasi dalam Administrasi Publik

Transformasi dalam administrasi publik merupakan proses perubahan mendasar yang melibatkan aspek struktur, proses, teknologi dan budaya organisasi. Menurut Osborne (2010), transformasi sektor publik bertujuan untuk menciptakan nilai publik melalui inovasi dan kolaborasi. Dalam perspektif organisasi, transformasi dapat didefinisikan sebagai perubahan strategis yang menyeluruh dalam sistem organisasi untuk meningkatkan kinerja dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Dalam konteks modern, transformasi administrasi publik ditandai oleh integrasi teknologi digital, pemanfaatan big data, peningkatan transparansi, dan kolaborasi lintas institusi, yang kemudian dikenal sebagai *Digital-Era Governance* (Dunleavy et al., 2006). Dengan karakter utamanya reintegrasi fungsi pemerintah, digitalisasi layanan, dan orientasi pada kebutuhan pengguna. Berdasarkan integrasi teori kinerja, administrasi publik, dan transformasi, dapat disimpulkan bahwa transformasi kinerja administrasi publik merupakan proses perubahan

sistematis dalam organisasi pemerintah yang mencakup perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi, serta reformasi kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan akuntabilitas layanan publik.

Dalam penelitian ini, transformasi kinerja administrasi publik dipahami sebagai hasil interaksi tiga komponen utama, yaitu tata kelola data (*governance perspective*) untuk menjamin kualitas dan integrasi data dalam mendukung pengambilan keputusan, Digitalisasi (*technology perspective*) yang berfungsi sebagai faktor pendukung (*enabler*) dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan, serta reformasi birokrasi (*institutional perspective*) yang memperkuat kapasitas organisasi dan berkelanjutan transformasi. Transformasi kinerja administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh dinamika kelembagaan dan tata kelola yang berkembang secara simultan dalam menghadapi tuntutan era digital.

Kajian teoritis ini mengintegrasikan perspektif kinerja administrasi publik (Dwiyanto, 2006; Dooren et al, 2015), teori administrasi publik modern (Henry, 2013; Rosenbloom, 2008), serta teori transformasi organisasi dan *digital governance* (Dunleavy et al, 2006; Vial, 2019), sehingga menghasilkan kerangka analisis yang komprehensif dalam menjelaskan transformasi kinerja administrasi publik berbasis data digital.

B. Hasil Penelitian

1. Transformasi Tata Kelola Data dan Dampaknya terhadap Kinerja Administrasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi administrasi publik di Badan Pusat Statistik (BPS) dimulai secara signifikan sejak implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) pada tahun 2019. Pada periode ini, BPS mengalami perubahan fungsi strategis dari produsen data, menjadi wali data statistik nasional yang berperan dalam standarisasi, integrasi, dan interoperabilitas data. Integrasi data melalui SDI meningkatkan akuntabilitas dan kualitas data. Hal ini mendukung konsep *data governance* dalam administrasi publik modern (Jansen et al., 2016).

Pada fase pra-transformasi (2014-2018), tata kelola di BPS masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi antar instansi. Ini menyebabkan terjadinya duplikasi data, inkonsistensi dalam indikator, dan keterlambatan dalam penyediaan informasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas kinerja administrasi publik.

Memasuki fase awal transformasi (2019), implementasi SDI menjadi awal titik kritis (*critical juncture*) yang mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola data. Standarisasi metadata, penggunaan sistem kode referensi, serta penguatan interoperabilitas mulai diterapkan secara sistematis. Transformasi ini berdampak pada peningkatan konsistensi dan kredibilitas data, sehingga mendukung proses pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Pada fase akselerasi (2021-2024), tata kelola data semakin diperkuat melalui integrasi data lintas kementerian/lembaga. Disini BPS berperan aktif dalam pembinaan statistik sektoral, sehingga terjadi peningkatan kualitas data di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan administrasi publik dalam aspek efektivitas (data lebih relevan dengan kebutuhan kebijakan) dan aspek akuntabilitas (data lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan).

2. Transformasi Digital dan Peningkatan Efisiensi Kerja

Seiring dengan modernisasi tata kelola data, BPS juga telah melakukan transformasi digital dalam proses produksi statistik, implementasi teknologi digital yang meliputi: survei berbasis online, integrasi data administratif, pemanfaatan big data, dan pengembangan platform diseminasi digital. Dalam perspektif *time-series*, transformasi digital mengalami percepatan pada periode 2020-2024 terutama sebagai respon terhadap kebutuhan data yang cepat selama pandemi COVID-19. Digitalisasi memungkinkan pengumpulan dan pengolahan data berlangsung secara lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Adopsi teknologi digital meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan statistik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Vial (2019) dan Mergel et al. (2019) yang menyatakan bahwa digitalisasi menjadi *enabler* utama transformasi organisasi publik.

Dampak utama transformasi digital terhadap kinerja administrasi publik meliputi:

- Peningkatan efisiensi dalam proses pengumpulan dan pengolahan data menjadi lebih cepat

sehingga mengurangi biaya operasional serta beban responden.

- Peningkatan responsivitas, BPS mampu menyediakan data secara lebih cepat untuk merespon isu-isu strategis nasional, seperti kemiskinan, inflasi dan ketenagakerjaan.
- Peningkatan Aksesibilitas, dimana data statistik dapat diakses lebih luas melalui platform digital, sehingga meningkatkan kulaitas pelayanan publik.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa transformasi digital masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas SDM, serta isu keamanan data. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi, meskipun merupakan enabler utama, namun masih tetap membutuhkan dukungan dari kelembagaan yang kuat.

3. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Transformasi kinerja administrasi publik di BPS tidak hanya didorong oleh teknologi, namun juga dikuatkan dengan reformasi birokrasi. Reformasi yang mencakup modernisasi proses bisnis statistik, penyederhanaan prosedur kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan koordinasi lintas instansi. Dalam fase akselerasi dan integrasi (2021-sekarang), reformasi birokrasi di BPS diarahkan pada peningkatan kinerja yang berdampak langsung terhadap masyarakat (*impact-oriented boreaucracy*). Hal ini tercermin dari peningkatan kualitas pelayanan statistik, peningkatan kecepatan diseminasi data, dan peningkatan koordinasi antar lembaga dalam implementasi SDI.

Dari perspektif kinerja administrasi publik, reformasi birokrasi berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas organisasi, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan akuntabilitas kelembagaan. Namun, reformasi ini masih menghadapi tantangan seperti resistensi organisasi terhadap perubahan, kesenjangan kompetensi SDM, serta koordinasi yang belum optimal antar instansi pemerintah. Reformasi birokrasi memperkuat kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan transformasi. Hal ini mendukung teori *governance* yang menekankan pentingnya integrasi kelembagaan (Osborne, 2018).

Tabel 1. Hasil Transformasi Kinerja Administrasi Publik BPS (Pendekatan *Time-Series*)

Dimensi Transformasi	Periode Pra-Transformasi (2014–2018)	Fase Awal Transformasi (2019)	Fase Akselerasi (2021–2024)	Dampak terhadap Kinerja Administrasi Publik
Tata Kelola Data	Data sektoral, belum terintegrasi; standar tidak seragam	Implementasi Satu Data Indonesia; mulai standarisasi metadata	Integrasi data lintas instansi; penguatan interoperabilitas	Meningkatkan akuntabilitas dan konsistensi data
Digitalisasi Statistik	Survei manual, sistem terbatas	Mulai penggunaan survei online dan sistem terpusat	Pemanfaatan big data, AI, dan platform digital	Meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi data
Reformasi Birokrasi	Proses bisnis konvensional; koordinasi terbatas	Modernisasi awal proses bisnis statistik	Reformasi birokrasi tematik; peningkatan SDM	Meningkatkan efektivitas organisasi dan kualitas layanan
Koordinasi Antar Instansi	Ego sektoral tinggi; data terfragmentasi	Mulai koordinasi melalui SDI	Kolaborasi lintas K/L semakin kuat	Meningkatkan responsivitas kebijakan basis data
Kualitas Data Statistik	Lambat, kurang mutakhir	Mulai peningkatan kualitas & standar	Data lebih cepat, mutakhir, & granular	Meningkatkan relevansi kebijakan publik

Sumber: Hasil Penelitian

C. Pembahasan

Analisis komparatif antar periode menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam kinerja administrasi publik di BPS, khususnya antara periode sebelum dan sesudah tahun 2019. Sebelum 2019, sistem statistik bersifat sektoral dan tidak terintegrasi. Setelah SDI, terjadi peningkatan

efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik berperan sebagai katalis transformasi (Dunn, 2018).

Tabel 2. Analisis Komparatif Kinerja Administrasi Publik BPS (Pre-Post 2019)

Indikator Kinerja	Sebelum 2019	Setelah 2019 (SDI & Digitalisasi)	Perubahan Kinerja
Efisiensi	Proses lambat, biaya tinggi	Proses lebih cepat dan efisien melalui digitalisasi	↑ Meningkatkan signifikan
Efektivitas	Data kurang relevan dengan kebutuhan kebijakan	Data lebih terintegrasi dan sesuai kebutuhan	↑ Meningkatkan
Responsivitas	Respon lambat terhadap isu kebijakan	Data lebih cepat tersedia (real-time/near real-time)	↑ Meningkatkan tinggi
Akuntabilitas	Data sulit dibandingkan antar instansi	Data terstandarisasi dan transparan	↑ Meningkatkan
Aksesibilitas	Akses terbatas	Data tersedia secara digital dan terbuka	↑ Meningkatkan signifikan

Sumber: Hasil Penelitian

Perbandingan kinerja administrasi publik di BPS diatas menunjukkan bahwa kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) berperan sebagai *policy driver* dalam meningkatkan kinerja administrasi publik di BPS. Transformasi yang terjadi bersifat sistematis dan tidak hanya terbatas pada aspek teknologi, tetapi juga mencakup tata kelola dan birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, transformasi kinerja administrasi publik di BPS dapat dijelaskan melalui integrasi tiga faktor utama, yaitu:

1. Tata Kelola Data (*Governance Driver*) menjadi fondasi dalam memastikan kualitas data melalui standarisasi dan interoperabilitas.
2. Digitalisasi (*Technology Enabler*) mempercepat proses statistik dan meningkatkan efisiensi operasional.
3. Reformasi Birokrasi (*Institutional Strengthening*) memastikan keberlanjutan transformasi melalui penguatan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ketika faktor tersebut saling berinteraksi secara simultan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, responsivitas dan akuntabilitas kinerja administrasi publik. Temuan ini memperkuat teori administrasi publik yang menyatakan bahwa transformasi kinerja organisasi publik bersifat multidimensional dan membutuhkan integrasi antara aspek teknologi, kelembagaan, dan tata kelola.



Gambar 2. Grafik Transformasi Kinerja Publik BPS (2014-2026)

Grafik pada gambar 2 menunjukkan bahwa transformasi kinerja administrasi publik BPS berlangsung secara bertahap melalui empat fase utama, yaitu pra-transformasi (2014-2018), fase awal transformasi (2019), fase akselerasi (2021-2024), dan fase integrasi (2025-sekarang), dengan titik kritis terjadi pada implementasi kebijakan Satu Data Indonesia tahun 2019.

Tabel 3. Data Empiris Pendukung Transformasi BPS

Indikator Transformasi	Data Konkret	Tahun	Interpretasi
Jumlah dataset nasional (SDI)	± 566.612 dataset tersedia di portal Satu Data Indonesia	2026	Menunjukkan peningkatan besar dalam integrasi dan ketersediaan data nasional
Jumlah dataset BPS di data.go.id	± 1.316 dataset	2025	BPS menjadi salah satu kontributor utama data nasional
Jumlah publikasi statistik BPS	> 5.800 publikasi digital	2026	Indikator peningkatan produksi dan diseminasi data
Pengguna internet Indonesia	72,78% populasi	2024	Meningkatkan basis pengguna data digital dan layanan statistik
Jumlah pengguna internet	± 212 juta pengguna	2025	Memperluas akses terhadap data BPS
Penetrasi mobile	125% dari populasi (356 juta koneksi)	2025	Mendukung akses data via mobile platform
Adopsi digital (UMKM sebagai indikator nasional)	hanya 12% UMKM menggunakan digital	2024	Menunjukkan masih adanya gap literasi dan penggunaan data digital

Sumber: Data penelitian diolah dari Portal Satu Data Indonesia, BPS, DataReportal

Data empiris menunjukkan bahwa transformasi kinerja administrasi publik di Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya bersifat normatif, namun juga didukung oleh perkembangan indikator kuantitatif yang signifikan. Dari sisi tata kelola nasional, ketersediaan lebih dari 556 ribu data set dalam portal Satu Data Indonesia (SDI) mencerminkan kemajuan dalam integrasi dan interoperabilitas data pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan SDI berhasil mendorong peningkatan kapasitas sistem data nasional secara sistematis.

Selain itu, kontribusi BPS dengan sekitar 1.316 dataset menunjukkan peran strategis lembaga ini sebagai penyedia data utama dalam ekosistem data nasional. Hal ini menegaskan posisi BPS bukan hanya sebagai produsen data, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam tata kelola data publik.

Dari aspek produksi dan diseminasi statistik, BPS telah menghasilkan lebih dari 5.800 publikasi statistik digital yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyebaran informasi kepada publik. Pada sisi kesiapan digital masyarakat, data menunjukkan bahwa 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet, dengan jumlah pengguna mencapai sekitar 212 juta orang.

Tingginya penetrasi internet tersebut memperkuat aksesibilitas layanan statistik BPS, pemanfaatan data dalam kebijakan publik, peningkatan responsivitas administrasi publik. Namun demikian, data juga menunjukkan adanya kesenjangan digital, dimana hanya sekitar 12% UMKM yang telah mengadopsi teknologi digital secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya transformasi dan masih terdapat tantangan pada aspek digital dan kesiapan pengguna.

Data empiris tersebut memperlihatkan bahwa transformasi administrasi publik di BPS telah menghasilkan peningkatan nyata dalam ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas data statistik. Namun, disisi lain, kesenjangan dalam pemanfaatan data digital menunjukkan bahwa transformasi kinerja administrasi publik masih memerlukan penguatan pada aspek inklusivitas dan literasi digital masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian artikel ilmiah ini menunjukkan bahwa transformasi kinerja administrasi publik di Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan proses yang bersifat bertahap, sistemik dan berkelanjutan, dengan titik perubahan sejak implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada tahun 2019. Transformasi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga mencakup perubahan mendasar dalam tata kelola data, penggunaan teknologi digital, serta reformasi birokrasi.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi tata kelola data mengindikasikan standarisasi, interoperabilitas, dan integrasi data telah meningkatkan kualitas dan konsistensi statistik nasional. Disisi lain, adopsi teknologi digital dalam proses produksi dan diseminasi data terbukti meningkatkan efisiensi operasional serta mempercepat penyediaan data bagi kebutuhan kebijakan publik. Selain itu, reformasi birokrasi berperan penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan instansi dan keberlanjutan transformasi organisasi di BPS.

Secara keseluruhan, transformasi yang dilakukan BPS menghasilkan peningkatan signifikan dalam kinerja administrasi publik, khususnya pada aspek: efisiensi proses statistik, efektivitas penyediaan data, responsivitas terhadap kebutuhan kebijakan, serta akuntabilitas pelayanan publik. Namun, transformasi ini masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kesenjangan digital antar instansi dan wilayah, serta isu keamanan dan integrasi data. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi kinerja administrasi publik belum sepenuhnya merata dan masih memerlukan penguatan kebijakan serta kapasitas kelembagaan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi kinerja administrasi publik di era digital tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui integrasi antar tata kelola data, teknologi digital, dan reformasi birokrasi secara simultan. Pendekatan ini menjadi kunci dalam mewujudkan perumusan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Saran dari penelitian ini bagi instansi adalah dengan meminimalisasi tantangan dalam keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, mengurangi kesenjangan digital antar instansi dan wilayah, meningkatkan keamanan dan keselarasan integrasi data. Pemerataan transformasi kinerja administrasi publik diharapkan dapat menjadi penguat kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., & Rahayu, A. S. Y. (2023). Analysis of Satu Data Indonesia policy implementation. *Jurnal UDA*, 31(1), 708–719. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3115>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Cerita data statistik untuk Indonesia: Transformasi digital*. <https://www.bps.go.id/id/publication> [bps.go.id](https://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Publikasi statistik Indonesia (digital library)*. <https://www.bps.go.id/id/publication>
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2019). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198790630.001.0001>
- Bouckaert, G., & Halligan, J. (2016). *Managing performance: International comparisons*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315570036>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Christensen, T., Lægreid, P., & Rykkja, L. H. (2016). *Organizational theory and the public sector*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (Updated ed.). Routledge.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui057>
- Dunleavy, P. (2016). *Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government*. Oxford University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.



<https://doi.org/10.4324/9781351179811>

- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Gajah Mada University Press.
- Henry, N. (2013). *Public administration and public affairs* (12th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315666579>
- Hood, C., & Dixon, R. (2015). *A government that worked better and cost less? Evaluating public sector reform*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199679286.001.0001>
- Portal Satu Data Indonesia. (2026). *Regulasi Satu Data Indonesia*. <https://data.go.id/regulation>
- Portal Satu Data Indonesia. (2026). *Portal data nasional Indonesia*. <https://data.go.id>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019). *Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-tandangani-perpres-no-392019-tentang-satu-data-indonesia/>
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan critical success factors. *Jurnal Komunika*, 10(1), 13–21. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>
- Kurniawan, T. (2018). Reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(2), 127–135. <https://doi.org/10.24258/jian.v15i2>
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Mochtar, M. F., & Shishadiyati. (2024). Transformasi digital BPS: Hambatan dan peluang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 1–10.
- Moehersono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Rajawali Pers.
- Nugroho, R. (2020). *Public policy: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan, dan manajemen kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Osborne, S. P. (Ed.). (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203861683>
- Osborne, S. P. (2018). *Public service logic: Creating value for public service users, citizens, and society*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315200605>
- Pollitt, C. (2016). *Advanced introduction to public management and administration*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781784712333>
- Rachmawati, V. (2025). Peran strategis dan tantangan BPS dalam penyediaan data SDGs. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 9(1).
- Rosenbloom, D. H. (2008). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Sedarmayanti. (2018). *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan*. Refika Aditama.
- Siregar, R. (2023). Transformasi digital Badan Pusat Statistik pada era big data. *Jurnal Multidisiplin*, 1(11), 45–52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355153>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. (2015). *Performance Management In The Public Sector* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315817599>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.isis.2019.01.003>
- Wicaksono, K. (2020). Reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 150–162. <https://doi.org/10.22212/jap.v10i2>